



INTISARI



Kemiskinan adalah fenomena sosial yang muncul sebagai efek dari proses pembangunan. Negara memang berupaya untuk menanggulangnya melalui program kebijakan anti kemiskinan yang didanai oleh pajak. Namun kompleksitas yang dihadapi negara mengakibatkan penanggulangan kemiskinan tidak dapat diatasi oleh negara saja, tetapi juga harus melibatkan elemen lain dalam pembangunan, yaitu swasta dan organisasi masyarakat.

Zakat merupakan sumber daya ekonomi yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang secara konsep dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat yang dikelola oleh organisasi masyarakat yang diakreditasi sebagai LAZ, seharusnya memiliki nilai lebih karena memungkinkan adanya program-program redistribusi kekayaan secara efektif dan tepat sasaran dengan model pemberdayaan.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, paradigma *critical theory* menjadi panduan untuk mengetahui realitas yang berkembang di dunia perzakatan, khususnya di Provinsi DIY, dengan Rumah Zakat Indonesia sebagai subyek penelitian. Di sini peneliti adalah sebagai instrumen penelitian dengan teknik observasi partisipan. Metode ini memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pendayagunaan zakat sebagai instrumen alternatif dapat berperan dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Yogyakarta serta mengungkap banyak fakta di balik proses tersebut.

Aktivitas pendayagunaan zakat selama ini bersifat karitatif dan program-program pendayagunaan zakat khususnya di Yogyakarta, belum mampu menanggulangi kemiskinan sebagaimana konsepnya. Lemahnya dukungan pemerintah terhadap kebijakan zakat dan minimnya kepekaan masyarakat akan urgensi berzakat serta pemberdayaan dalam pendayagunaan zakat, menjadi sebab utama belum mampunya zakat menjadi instrumen alternatif dalam menanggulangi kemiskinan secara optimal. Padahal dengan potensi yang mencapai 20 triliun rupiah pertahun, zakat layak mendapat perhatian khusus dalam proses pembangunan daerah maupun negara.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi tersebut mencakup edukasi publik mengenai urgensi pemberdayaan dengan menggunakan dana zakat, pembuatan regulasi zakat yang mengakomodasi kepentingan *stakeholders*, sosialisasi maksimal akan urgensi zakat, dan komitmen *Good Governance* bagi LAZ untuk menghindari penyalahgunaan kepercayaan masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada lembaga.

Kata kunci: kemiskinan, zakat, pemberdayaan.



ABSTRACT

Poverty is a social phenomenon which rises as a development process effect. The government has some efforts to handle it with many programs of poverty reduction which are supported by taxes. But the complexity faced by the government causes the poverty reduction programs can not be handled by the government itself without the participation of the private sector and civil society organizations as another element in the development process.

Alms (zakah) is an economic resource which comes from the people themselves. Conceptually, it can reduce poverty. Alms handled by LAZ-accredited civil society organizations should have added values. This is because they can make effective wealth redistribution programs using the empowerment model.

This research uses a qualitative method and a critical theory paradigm. They become the guideline to understand the reality growing in the field of alms, especially in Province of Yogyakarta Special Region and Rumah Zakat Indonesia as the research subject. The researcher herself is the instrument in this research by using participant observation technique. This method is adequate to answer the research's problem on how alms distribution as an alternative instrument functions in reducing poverty in Yogyakarta, by uncovering the facts during the process.

Along the way, alms distribution activity is charitable and its distribution in Indonesia, especially in Yogyakarta, has not been able to reduce the poverty as in the concept. Alms can not function optimally for lack of the government's support on alms policy and the people's understanding about the urgency of alms and society empowerment in alms distribution. Whereas, having potency about 20 trillion rupiahs a year, alms should get special attention in both national and regional development.

On the bases of the facts, this research results some recommendations. They are public educations on the urgency of social empowerment through alms distribution for all stakeholders, making alms regulation accommodating the interests of all stakeholders, maximal socialization about the urgency of alms, and Good Governance commitment to alms distribution organizations to avoid the misuse of the people's trust in paying their alms to the institution.

Keywords: poverty, alms, empowerment.